

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROPINSI JAMBI

Ahmad Soleh¹, Yunie Rahayu¹
¹ Staff Pengajar STIE Muhammadiyah Jambi
yunie.soleh@gmail.com

ABSTRAK

Analisis pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Propinsi Jambi dilakukan karena Fenomena membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan sosial ekonomi di Propinsi Jambi ternyata tidak diimbangi penurunan jumlah penduduk miskin secara absolute. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Selama periode 2005 – 2015 angka kemiskinan penduduk Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 0.30% per tahun. Dari persamaan regresi di atas dapat diterjemahkan bahwa setiap terjadi peningkatan usia hidup sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan sebesar 1.02 persen.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak persoalan ekonomi diantaranya adalah kemiskinan dan pengangguran yang sampai sekarang belum teratasi secara signifikan (Tan, 2010). Masalah pengangguran dan kemiskinan menjadi persoalan yang serius karena perkembangan ekonomi yang tinggi kurang bermanfaat meningkatkan kesejahteraan walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.

Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Demikian juga kemiskinan yang merupakan masalah yang sangat mendasar yang harus ditanggulangi secara terpadu dan terencana dalam bingkai program dan kegiatan pembangunan nasional karena masalah kemiskinan ini merupakan persoalan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang menjadi pelaksana dan yang akan menikmati pembangunan itu adalah manusia. Kondisi kemiskinan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik dan terlalu mengutamakan pertumbuhan

ekonomi di masa orde lama hingga orde baru. Pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata, terjadi kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan berpengaruh terhadap perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai kecemburuan pada masing-masing masyarakat itu sendiri.

Strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan kemiskinan yang membengkak, ketimpangan pendapatan yang semakin besar dan tingkat pengangguran yang bertambah. Hal ini terjadi karena pendapatan per kapita tidak menggambarkan pendistribusian hasil yang merata dalam menyelenggarakan pembangunan yang dilakukan. Hasil pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan akan terkonsentrasi hanya pada kelompok masyarakat. Berdasarkan inilah kita tidak dapat melihat bahwa kesejahteraan rakyat hanya mengandalkan kemampuan modal fisik saja tetapi juga harus melihat kepada modal manusianya sendiri sebagai penggerak pembangunan yang dikenal dengan teori Human Capital

yang akan mendorong peningkatan terhadap pembangunan.

Berdasarkan data sejak tahun 2010-2015 rata-rata lama penduduk bersekolah mengalami kecenderungan meningkat yang mencerminkan membaiknya tingkat pendidikan masyarakat. Sementara usia harapan hidup juga mengalami peningkatan. Fenomena membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan sosial ekonomi di atas ternyata tidak diimbangi penurunan jumlah penduduk miskin secara absolute. Fenomena kemiskinan itu sendiri bukan hanya menjadi gambaran sosial ekonomi saja, termasuk aspek budaya dan geografis. Namun demikian juga dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan sendiri dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, program pembangunan maupun pemberdayaan melalui akses permodalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2005-2015.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung diartikan

sebagai kapasitas dalam sebuah perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Menurut Meller (1999), bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Pembangunan ekonomi juga merupakan pembangunan sosial ekonomi yang ditandai terjadinya peningkatan taraf hidup yang tercermin dalam peningkatan pendapatan perkapita dan pemenuhan kebutuhan pokok. Penekanan pada kenaikan pendapatan perkapita dalam kurun waktu yang panjang diartikan bahwa disamping adanya pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi dan pendapatan perkapita, pertumbuhan penduduk juga meningkat. Bila pertumbuhan GNP sama dengan atau lebih rendah dari tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan tetap sama atau bahkan turun.

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara

untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dan taraf hidup masyarakatnya (Arsad,1997). Demikian juga Dyoyohadikusumo, (1995) mengartikan bahwa pembangunan sebagai suatu transformasi dalam arti perubahan struktural yang dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk struktur ekonomi.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perbandingan peningkatan antara input dan output yang lebih besar serta adanya perkembangan ekonomi. Menurut Wijaya (1990) pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadinya kenaikan produk domestik regional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Atau pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita dari perekonomian dalam suatu wilayah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam

proses pertumbuhan ekonomi diantaranya:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Sumber daya alam
- c. Pemupukan modal
- d. Spesialisasi
- e. Efisiensi dalam penggunaan teknologi
- f. Kemajuan teknologi

Menurut Boediono,1992. pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, yang terbagi dalam tiga aspek diantaranya:

1. Proses yang menggambarkan bagaimana suatu perekonomian berkembang dari waktu ke waktu
2. Output perkapita sangat erat kaitannya dengan output secara total yang ditunjukkan melalui GNP serta jumlah penduduk. Artinya bila pertumbuhan GNP lebih besar dari pertumbuhan penduduk berarti terjadi pertumbuhan dan sebaliknya
3. Berkaitan dengan waktu jangka panjang, jika dalam periode tertentu terjadi penurunan output namun dalam jangka panjang meningkat maka ini dapat dikatakan pertumbuhan.

Konsep Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal,

dimana mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar inilah yang disebut garis kemiskinan.

Menurut De Vos, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih, tujuan-tujuan yang dimaksud disini dapat diinterpretasikan sesuai persepsi seseorang. Dengan demikian dapat diartikan berdasarkan kondisi seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan (Suparta, 2003).

Dilain pihak Friedman (1979), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak samaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi modal yang produktif atau asset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan dan lain-lain); sumber-sumber keuangan (income dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi dan lain-lain);

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

Secara Nasional per Maret 2010, BPS mengeluarkan Standar Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 211.000,- per bulan per orang, yang diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan makanan pokok sebesar Rp.155.615,- per bulan dan non-makanan Rp. 56.000,- per bulan.

Standar Kemiskinan Internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), penduduk miskin adalah yg memiliki pengeluaran per hari sebesar US \$ 2 atau kurang (Kurs Rupiah Rp.9.000,-), maka penduduk dikatakan miskin bila pendapatannya kurang dari Rp. 18.000,- per hari. Selanjutnya, Bank Dunia yang menggunakan metode *Purchasing Power Parity* (PPP), juga menetapkan klasifikasi penduduk sangat miskin (*extreme poor*) untuk yang pengeluarannya per hari dibawah US \$1.

Indikator Kemiskinan

Ada dua pendekatan seseorang tergolong sebagai orang miskin. *Pertama*, pendekatan *absolute* yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Tolok ukur yang dipakai

adalah kebutuhan keluarga dengan memperhatikan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana, tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Termasuk didalamnya kebutuhan akan pangan, perumahan, sandang, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak. Menurut pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai kebutuhan fisik pada tingkat minimal dari standar kebutuhan yang sudah ditetapkan.

Kedua, adalah pendekatan *relatif* yang mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan seseorang dalam masyarakat. Tolok ukur yang dipakai adalah tingkat pendapatan kepala keluarga per bulan atau per tahun. Berdasarkan tolok ukur ini seseorang yang tergolong miskin ditentukan dari kedudukan relatifnya dalam masyarakat dengan memperhatikan sejauh mana mutu kehidupannya berbeda dibandingkan dengan rata-rata mutu kehidupan yang berlaku secara keseluruhan. Menurut pendekatan relatif, kemiskinan sekelompok orang dalam masyarakat yang hidup dalam keadaan melarat, terhina dan tidak layak, disebabkan tidak

meratanya pembagian pendapatan didalam masyarakat.

Ukuran Kemiskinan

Sayogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dan perkotaan. Untuk daerah perdesaan, apabila seseorang mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun.

Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari Sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah

dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Adapun data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan PDRB, persentase penduduk yang bersekolah, usia harapan hidup dan data lainnya yang terkait dengan analisis yang digunakan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

a. Analisis Deskriptif

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang berbasis pada perkembangan data kemiskinan dalam kurun waktu 2005 – 2015. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PAK = \frac{AK_t - AK_{t-1}}{AK_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

- PAK = Pertumbuhan Angka Kemiskinan
- AK_t = Angka kemiskinan tahun t
- AK_{t-1} = Angka kemiskinan satu tahun sebelumnya

b. Analisis Kualitatif

Analisis kuantitatif menggunakan regresi berganda yaitu:

$$P_{ov} = \beta_0 - \beta_1 \text{ Log } X_1 - \beta_2 \text{ Log } X_2 - \epsilon$$

Dimana :

- P_{ov} = Jumlah kemiskinan
- X₁ = Usia Harapan Hidup
- X₂ = Rata-rata lama bersekolah penduduk provinsi Jambi
- β₀ = Konstanta
- β₁ = Koefisien Regresi
- ε = Kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Jambi

Selama periode 2005 – 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang sangat fluktuatif meskipun demikian secara rata-rata menunjukkan penurunan. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel.1. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2005	317.800	-
2006	304.600	(4.15)
2007	281.900	(7.45)
2008	261.200	(7.34)
2009	245.000	(6.20)
2010	260.500	6.33
2011	251.360	(3.51)
2012	268.470	6.81
2013	277.740	3.45
2014	281.750	1.44
2015	300.170	6.73
Rata2	-	(0.39)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Secara absolut laju peningkatan penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 268.470 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6.81%. Peningkatan yang cukup tinggi sebagai dampak dari kenaikan batas kemiskinan minimal. Pendataan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2012 yang sudah barang tentu berimbas pada penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang-barang terutama kebutuhan pokok masyarakat. Laju penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 7,45%. Penurunan jumlah penduduk miskin di

Provinsi Jambi ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi sendiri. Kebijakan dari pemerintah pusat diantaranya program penanggulangan kemiskinan (P2KP), Pprogram IDT dan program peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera, pra sejahtera dan sejahtera I.

Selama periode 2005 – 2015 angka kemiskinan penduduk Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 0.30% per tahun. Penurunan jumlah penduduk miskin memberikan gambaran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin meskipun pada kenyataannya ada beberapa tahun yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi memberikan dampak yang luas terhadap peluang berusaha secara lebih adil di tengah-tengah masyarakat sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Hasil Pengujian Regresi

Dari hasil pengujian regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Nilai Koefisien Regresi :

Model	Unstandar lized Coefficien ts		Standari lized Cooficie nt	t	Si g.
	B.	Std. Err or	Beta		
1 (const ant)	5.9	2.9	-.203 -.452	2.0	.0
	89	39		38	76
	-	.30		-	.0
	1.0	4		3.3	12
	22	.26		61	.0
	-	4		-	00
1.5			5.7		
11			23		

Berdasarkan tabel dia tas maka disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.5989 - 1.022X_1 - 1.511X_2 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diterjemahkan bahwa setiap terjadi peningkatan usia hidup sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan sebesar 1.02 persen. Di sisi lain setiap terjadi peningkatan jumlah rata-rata lama bersekolah penduduk sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 1,511 persen, namun bila diasumsikan tidak terjadi perubahan yang positif terhadap tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan maka jumlah penduduk miskin akan mengalami pertumbuhan yang positif.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Selama periode 2005-2015 angka kemiskinan penduduk Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 0,39%. Secara rata-rata selama periode 2005-2015 usia harapan hidup mengalami peningkatan 0,36%. Selama periode 2005-2015 tingkat lama bersekolah penduduk Provinsi Jambi menunjukkan keadaan membaik, yaitu sebesar 0,22% per tahun
2. Setiap terjadi peningkatan usia harapan hidup sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan sebesar 1,022 persen. Di sisi lain setiap terjadi peningkatan jumlah rata-rata lama bersekolah penduduk maka sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 1,511 persen, bila diasumsikan tidak terjadi perubahan yang positif terhadap tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan maka jumlah penduduk miskin akan mengalami peningkatan 61,3% sementara sisanya sebesar 38.7% dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak dijelaskan dalam model.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. Program Pengentasan Kemiskinan, Kantor Menko Kesra, Jakarta
- _____. 2004. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Kantor Menko Kesra, Jakarta.
- _____. 2003. Laporan Pendataan Keluarga Propinsi Jambi, BKKBN, Propinsi Jambi.
- _____. Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Jambi, Jambi
- _____. 2001. laporan Pembangunan Manusia 2001 menuju Konsesus Baru, BPS, Bappenas, BPS Provinsi Jambi
- _____. 2000 Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi 2004 – 2009 Bappeda, BPS Provisi Jambi
- Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Tebo.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil Susenas; 2012.
- Dyoyohadikusumo, (1995). Ekonomi Pembangunan, LP3E, Jakarta.
- Fahela Agus Halim Wijaya Waruwu. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nias*.
- Fantony, Achmad., (2011). Kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis participatory poverty assesment: kasus yogyakarta. Jurnal Sosiokonsepsia, Vol.16.No.02 Tahun 2011.
- Handayani, Boa. 2008. *Analisis Model Kemiskinan Perdesaan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No.1.
- Junaidi, Arius., (2012); Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi (JKE) Volume 1, Nomor 1, April 2013.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (2012); *Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*. Jakarta 2012.
- Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, (2013); *Penguatan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta 2013.
- Mankiw, N. Gregory, (2003); *Teori Makroekonomi*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Mochamad Syawie. (2011); *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*. Jurnal Eekonomi Pembangunan. Vol.16.No.3
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Permana, Anggit Yoga dan Arianti, Fitri (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah*, <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/jme>.
- Putri, Jazzi Andhiny, (2012); *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, IPM Terhadap Kemiskinan di Jatim*, <http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/5134829443> abs.pdf. 12-5-2012

- Remi Soemitro Sutyastie dan Tjiptoherijanto prijono, (2002); *"Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia"*, Edisi Indonesia – Inggris, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salvatore Dominick, (1994); *Ekonomi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Samuelson, Paul dan Nordhaus, (1999); *Mikro Ekonomi*, Ed. XIV, Erlangga, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, (2000); *Pengantar Teori Makroekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Hermanto, wahyuniarti, (2011); *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin*,
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROSS2008_MAK3.diakes, 18-10-2012
- Soleh, Ahmad., (2012); *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Region Di Indonesia Tahun 2001-2010*. Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) Volume:04.No.03.
- Todaro, M.P., (1998); *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*, Edisi keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.